

## Analisis Trade-Off Alokasi Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Defisit APBN Dan Kesejahteraan Masyarakat

Daffa Falih Syahbana<sup>1</sup>, Rizkyka Delo Octaviana<sup>2</sup>, Muhammad Ammar Kahfi<sup>3</sup>,  
Bimo Tri Kusuma Hadi<sup>4</sup>, Achmad Akbar<sup>5</sup>, Dudi Duta Akbar<sup>6</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bina Sarana Informatika  
email korespondensi: [daffafalih274@gmail.com](mailto:daffafalih274@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 06/06/2026

Revised 07/06/2026

Accepted 08/06/2026

### Abstract

This study aims to analyze the trade-off of budget allocation for the development of the Nusantara Capital City (IKN) on the State Budget (APBN) deficit and public welfare from the perspective of governmental accounting. The study employed a qualitative descriptive method using a documentation study approach through secondary data derived from the 2025 State Budget Financial Note and the 2026 Draft State Budget Financial Note. The analysis focused on the development of the IKN budget allocation, the condition of the APBN deficit, and its implications for public welfare and fiscal sustainability. The findings indicate that the development of IKN requires substantial budget allocation, thereby contributing to fiscal pressure amid the increasing APBN deficit. Although the contribution of the IKN budget to the total APBN deficit is not the primary factor, the project still increases state expenditure through infrastructure financing, institutional development, and the operational costs of the new governmental system. On the other hand, the IKN development is considered a long-term investment expected to promote regional equality, create new economic growth centers, increase investment, and improve public welfare. This study concludes that the development of IKN reflects a fiscal policy trade-off between long-term development needs and fiscal sustainability, requiring transparent, accountable, and priority-based budget management in accordance with Government Accounting Standards (SAP).

**Keywords:** Nusantara Capital City, APBN Deficit, Fiscal Trade-off, Public Welfare, Governmental Accounting.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *trade-off* pengalokasian anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang akuntansi pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan dokumentasi menggunakan data sekunder yang berasal dari Nota Keuangan APBN 2025 dan RAPBN 2026. Analisis difokuskan pada perkembangan anggaran untuk pembangunan IKN, situasi defisit APBN, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan fiskal negara. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pembangunan IKN memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, sehingga memberikan tekanan pada APBN di tengah keadaan defisit yang terus meningkat. Walaupun kontribusi anggaran IKN terhadap total defisit APBN bukanlah faktor utama, proyek IKN tetap menambah beban pengeluaran negara melalui pembiayaan untuk infrastruktur, institusi, dan operasi pemerintahan yang baru. Sebaliknya, pembangunan IKN dipandang sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan mampu menghasilkan pemerataan pembangunan, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan investasi, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa pembangunan IKN menunjukkan adanya pertukaran dalam kebijakan fiskal antara kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang dan keberlanjutan fiskal negara, sehingga memerlukan manajemen anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada prioritas sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**Kata Kunci:** Ibu Kota Nusantara, Defisit APBN, *Trade-off* Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Akuntansi Pemerintahan.



## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat kunci dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya publik demi mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks anggaran negara, APBN berperan lebih dari sekadar daftar pemasukan dan pengeluaran, dan juga berfungsi sebagai sarana perencanaan, kontrol, kebijakan fiskal, dan evaluasi kinerja pemerintah. Di samping itu, anggaran negara memiliki peran dalam distribusi dan stabilisasi ekonomi dengan tujuan menjaga keseimbangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, mutu pengelolaan APBN dinilai tidak hanya berdasarkan besar alokasi anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan keberlanjutan fiskal.

Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, pengelolaan APBN perlu dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010). Aturan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penyampaian informasi yang terpercaya dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengeluaran negara, termasuk untuk program strategis nasional, tidak hanya diperiksa berdasarkan realisasi anggarannya, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kondisi fiskal dan manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan fiskal utama yang kini menjadi fokus perhatian pemerintah adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini dirancang untuk meratakan pembangunan antar wilayah, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Namun, realisasi IKN memerlukan anggaran negara yang signifikan, terutama di awal tahap yang melibatkan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, dan sarana lainnya yang mendukung. Dalam jangka pendek, peningkatan pengeluaran ini mungkin tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan negara, sehingga ada kemungkinan akan memperbesar defisit anggaran negara.

Situasi ini menciptakan *trade-off* penting dalam kebijakan fiskal yang perlu diteliti, yaitu antara kebutuhan untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tuntutan untuk menjaga keberlanjutan fiskal agar defisit anggaran tetap dalam batas yang dapat dikendalikan. *Trade-off* ini menjadi semakin rumit karena manfaat dari pembangunan IKN bersifat jangka panjang dan tidak dapat dirasakan dengan segera, sementara dampak pada defisit anggaran muncul dalam jangka pendek.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti hubungan antara kebijakan fiskal, defisit anggaran, dan pembangunan nasional. Misalnya, penelitian oleh (Shafiyah Nur & Livia Putri, 2023) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan defisit anggaran. Peneliti lain, (Sinaga et al., 2025), mengungkapkan bahwa pengeluaran untuk infrastruktur memainkan peran kunci dalam memicu pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan tekanan pada keseimbangan fiskal. Selain itu (Soebagiyo & Dewi, 2026) menyatakan bahwa berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal maupun kondisi makro ekonomi, mempengaruhi defisit anggaran negara.

Namun, mayoritas studi yang ada masih membahas kebijakan fiskal dalam konteks yang luas dan belum secara mendalam mengeksplorasi *trade-off* antara penganggaran untuk pembangunan IKN, defisit APBN, serta kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang harus diisi, terutama dalam memahami bagaimana pengelolaan anggaran untuk proyek-proyek penting seperti IKN dapat mempengaruhi keseimbangan fiskal serta pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *trade-off* antara alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan defisit APBN dan kesejahteraan masyarakat. Ini dilakukan dengan memeriksa hubungan antara pengeluaran pembangunan IKN, perkembangan defisit APBN, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui sudut pandang akuntansi pemerintahan.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai instrumen utama untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi

ekonomi. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan akuntabel. (Wardani et al., 2023) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan kesejahteraan melalui pengeluaran pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, (Handayani & Huda, 2023) menyatakan bahwa APBN digunakan pemerintah sebagai alat untuk menentukan prioritas pembangunan nasional dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, pengelolaan APBN harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal negara.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan APBN tidak terlepas dari kondisi defisit anggaran yang sering terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara dalam satu periode anggaran. Dalam kebijakan fiskal, defisit sering digunakan pemerintah sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja negara. Namun, peningkatan defisit juga dapat memberikan tekanan terhadap keberlanjutan fiskal apabila tidak dikelola secara hati-hati. Penelitian oleh (Putri, Jeddawi, dan Utami., 2021) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara defisit keseimbangan primer dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila sebuah negara mengalami defisit keseimbangan primer, berarti pengeluaran negara akan melebihi pemasukan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang intensif dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan dorongan pada beberapa sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, angka pengangguran dapat berkurang, daya saing produk lokal dapat meningkat, dan investor akan tergugah untuk menanamkan modal mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya *trade-off* dalam kebijakan fiskal, khususnya antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal negara. Pemerintah sering dihadapkan pada pilihan untuk meningkatkan belanja pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi atau menjaga stabilitas fiskal agar defisit APBN tetap terkendali. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), *trade-off* fiskal menjadi semakin relevan karena proyek tersebut membutuhkan pembiayaan besar di tengah kondisi APBN yang masih mengalami defisit. Manfaat pembangunan IKN diharapkan dapat dirasakan melalui pemerataan pembangunan dan penciptaan pusat ekonomi baru. Akan tetapi, dalam jangka pendek, alokasi anggaran tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk program kesejahteraan lainnya yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Penelitian oleh (Albani et al., 2026) menunjukkan bahwa proyek strategis nasional sering kali menimbulkan dilema kebijakan fiskal antara kebutuhan investasi jangka panjang dan keterbatasan kapasitas anggaran negara. Oleh karena itu, pengelolaan proyek strategis memerlukan perencanaan fiskal yang matang agar manfaat pembangunan dapat dicapai tanpa memperburuk kondisi fiskal negara.

Selain berkaitan dengan pengambilan keputusan fiskal, pengelolaan APBN juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam perspektif akuntansi pemerintahan, pengelolaan APBN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus mampu menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Erival et al., 2023) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal memiliki pengaruh terhadap efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan IKN, prinsip akuntabilitas menjadi penting karena penggunaan dana publik yang besar harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari sisi manfaat yang dihasilkan terhadap masyarakat dan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal Negara

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran pengeluaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kaitannya dengan defisit APBN serta dampaknya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tipe data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan resmi pemerintah, terutama nota keuangan dan dokumen APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data yang dianalisis mencakup alokasi pengeluaran negara yang terkait dengan pembangunan IKN serta situasi defisit APBN selama periode pembangunan IKN.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari laporan APBN, nota keuangan, serta berbagai literatur ilmiah seperti jurnal dan publikasi yang terkait dengan topik penelitian. teknik pengumpulan

data dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber tulisan yang terkait dengan belanja pembangunan IKN serta defisit APBN

Teknik yang dipakai dalam menganalisis data adalah analisis deskriptif, yang melibatkan penguraian data yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya mempelajari hubungan antara belanja pembangunan IKN dengan defisit dari APBN. Proses analisis dilakukan dengan memeriksa perkembangan distribusi anggaran IKN dan pola defisit APBN dalam jangka waktu tertentu, lalu diinterpretasikan dalam konteks kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kekurangan APBN, dan kesejahteraan rakyat dipandang sebagai fenomena fiskal yang terkait satu sama lain dalam pengelolaan keuangan negara. Analisis tentang penganggaran pembangunan IKN dilihat sebagai elemen dari kebijakan pengeluaran negara yang berdampak pada kondisi fiskal pemerintah, khususnya pada defisit APBN. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat dijadikan sebagai tujuan utama dari kebijakan publik yang ditelaah melalui potensi keuntungan dari pembangunan IKN di masa mendatang. Dengan kata lain, inti dari penelitian ini berfokus pada pemahaman *trade-off* antara pengalokasian anggaran untuk pembangunan IKN, tekanan pada situasi fiskal negara, serta dampaknya terhadap usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang akuntansi pemerintahan.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah salah satu proyek nasional yang penting yang dijalankan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia. Dari sudut pandang kebijakan fiskal, pembangunan IKN dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga terjalin hubungan langsung dengan keadaan fiskal negara, terutama berkaitan dengan defisit APBN. Oleh karena itu, proyek IKN tidak hanya dapat dilihat sebagai kegiatan pembangunan biasa, tetapi juga sebagai keputusan fiskal yang memiliki kompromi antara kebutuhan investasi jangka panjang dan keberlanjutan fiskal negara.

**Tabel 1. Realisasi dan Alokasi Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2022–2026**

Tahun	Anggaran IKN (Rp Triliun)	Keterangan
2022	5,5	Realisasi Awal Pembangunan
2023	27	Percepatan pembangunan infrastruktur
2024	43,3	Puncak pembangunan tahap awal
2025	14,4	Penyesuaian dan efisiensi anggaran
2026	6,3	RAPBN 2026

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025 dan RAPBN 2026

Berdasarkan data di Tabel 1, anggaran untuk pengembangan IKN menunjukkan peningkatan yang substansial antara tahun 2022 hingga 2024. Kenaikan ini mencerminkan fokus pemerintah pada pengembangan infrastruktur dasar, area pemerintahan, dan fasilitas pendukung lainnya di fase awal proyek IKN. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai Rp43,3 triliun, sehingga total alokasi APBN untuk proyek IKN sejak tahun 2022 mencapai sekitar Rp75,8 triliun.

Namun, pada tahun 2025 dan 2026, terjadinya penyesuaian anggaran yang cukup besar. Dalam RAPBN 2026, pemerintah hanya menyediakan sekitar Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN. Penurunan ini menandakan bahwa pemerintah berusaha untuk melakukan efisiensi dan mengendalikan pengeluaran negara di tengah tantangan fiskal serta situasi defisit APBN yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai merasakan keterbatasan ruang fiskal sehingga pengembangan IKN tidak bisa didorong dengan cara yang luas seperti di fase awal.

Dalam konteks pengorbanan fiskal, kenaikan anggaran untuk pembangunan IKN di awal proyek mencerminkan keputusan pemerintah untuk mengorbankan stabilitas fiskal dalam jangka pendek demi memperoleh potensi manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Namun, saat tekanan fiskal semakin meningkat, pemerintah mulai menyesuaikan anggaran demi menjaga keberlanjutan APBN.

Untuk memahami hubungan ini dengan lebih jelas, penting untuk menganalisis perkembangan kondisi APBN selama masa pembangunan IKN berlangsung.

**Tabel 2. Perkembangan APBN Indonesia Tahun 2023–2025**

Tahun	Pendapatan Negara (Rp T)	Belanja Negara (Rp T)	Defisit APBN (Rp T)
2023	2.774,3	3.121,9	347,6
2024	2.842,5	3.350,3	507,8
2025	2.756,3	3.451,4	695,1

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025 dan RAPBN 2026

Berdasarkan data dalam Tabel 2, situasi APBN Indonesia untuk tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa pengeluaran negara tetap melebihi pendapatan negara, yang mengakibatkan defisit APBN setiap tahun. Pada tahun 2023, defisit APBN tercatat mencapai Rp347,6 triliun. Kemudian, di tahun 2024, defisit mengalami peningkatan menjadi Rp507,8 triliun seiring dengan meningkatnya pengeluaran negara yang mencapai Rp3.350,3 triliun.

Pada tahun 2025, defisit APBN mengalami kenaikan lagi menjadi Rp695,1 triliun. Kenaikan defisit ini disebabkan pengeluaran negara yang terus bertambah hingga mencapai Rp3.451,4 triliun, sementara pendapatan negara justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi ini menunjukkan adanya tekanan fiskal yang semakin berat terhadap APBN. Dari sudut pandang kebijakan fiskal, peningkatan belanja negara dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut memperbesar kebutuhan pembiayaan negara dan meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jika tidak dikelola dengan baik.

Jika melihat dari sudut pandang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kondisi defisit APBN ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mempertahankan kebijakan belanja untuk pembangunan meskipun terjadi keterbatasan fiskal. Hal ini menggambarkan adanya *trade-off* dalam kebijakan fiskal antara kebutuhan akan pembangunan jangka panjang melalui proyek-proyek strategis nasional dan usaha untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka pendek.

**Tabel 3. Kontribusi Anggaran IKN terhadap Defisit APBN Tahun 2023–2025**  
(Anggaran IKN / Defisit APBN) × 100%

Tahun	Anggaran IKN (Rp T)	Defisit APBN (Rp T)	Kontribusi IKN terhadap Defisit
2023	27	347.6	7.8%
2024	43,3	507.8	8.5%
2025	14,4	695.1	2.1%

Sumber: Data diolah dari Nota Keuangan APBN 2025 dan RAPBN 2026

Berdasarkan data yang ada di Tabel 3, alokasi anggaran untuk pembangunan IKN memengaruhi defisit APBN dan mengalami perubahan sepanjang tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, dana yang dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp27 triliun, memberikan kontribusi sekitar 7,8% terhadap total defisit APBN. Kemudian, pada tahun 2024, kontribusi ini naik menjadi sekitar 8,5% karena anggaran untuk pembangunan IKN meningkat menjadi Rp43,3 triliun sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur serta wilayah pemerintahan di IKN.

Memasuki tahun 2025, anggaran untuk pembangunan IKN turun menjadi Rp14,4 triliun, sehingga kontribusinya terhadap defisit APBN berkurang menjadi sekitar 2,1%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah di tengah kondisi fiskal yang makin menantang. Meski kontribusi anggaran IKN terhadap defisit APBN menurun, total defisit APBN justru meningkat menjadi Rp695,1 triliun akibat bertambahnya belanja negara secara keseluruhan serta penurunan pendapatan negara.

Situasi ini mengindikasikan bahwa pembangunan IKN tidak menjadi satu-satunya faktor peningkatan defisit APBN, tetapi tetap merupakan bagian dari kebijakan belanja negara yang memberi tekanan kepada kondisi fiskal pemerintah. Dalam konteks *trade-off* fiskal, pemerintah tetap meneruskan pembangunan IKN karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pemerataan pembangunan antar wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Namun, dampak pembangunan IKN akan lebih dirasakan dalam jangka panjang dan belum terlihat secara langsung dalam waktu dekat. Di sisi lain, beban fiskal akibat pengalokasian dana pembangunan sudah mulai berpengaruh langsung terhadap kondisi APBN melalui peningkatan belanja negara. Oleh sebab itu, pembangunan IKN mencerminkan adanya dilema dalam kebijakan fiskal antara menjaga stabilitas APBN dalam jangka pendek serta melakukan investasi pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa depan.

**Tabel 4. Trade-off Anggaran IKN terhadap Ruang Fiskal dan Belanja Sosial Tahun 2025**

Komponen Belanja Negara Tahun 2025	Anggaran IKN (Rp T)
Anggaran IKN	14,4
Anggaran Pendidikan	724,3
Anggaran Kesehatan	218,5
Anggaran Pelindungan Sosial	503,2
Defisit APBN	695,1

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025, Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Tabel 4, pemerintah masih mengalokasikan Rp14,4 triliun untuk pembangunan IKN meskipun anggaran tahunan 2025 mengalami defisit signifikan sebesar Rp695,1 triliun. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menganggap pembangunan IKN sebagai prioritas utama dalam situasi keterbatasan fiskal. Dalam kerangka ruang fiskal, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan belanja negara sebenarnya sangat dipengaruhi oleh potensi pendapatan, tingkat defisit, dan kapasitas pembiayaan anggaran. Ketika defisit anggaran meningkat, ruang fiskal menjadi semakin sempit lantaran sebagian besar anggaran harus digunakan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib, pembayaran utang, serta program-program prioritas nasional lainnya.

Jika dibandingkan dengan sektor sosial, anggaran IKN memang terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun, persoalan utama dalam kajian ini bukanlah sekadar besar kecilnya nilai anggaran, tetapi lebih kepada biaya peluang dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam keadaan fiskal yang terbatas, setiap peningkatan belanja pemerintah akan mengakibatkan pengorbanan terhadap alternatif penggunaan anggaran yang lain. Dengan kata lain, alokasi Rp14,4 triliun untuk pembangunan IKN berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah untuk memperluas program bantuan sosial, memperbaiki kualitas layanan kesehatan, atau meningkatkan subsidi untuk masyarakat, yang dampaknya bisa segera dirasakan dalam jangka pendek.

**Tabel 5. Rasio Utang Pemerintah dan Pembiayaan APBN**

Tahun	Rasio Utang terhadap PDB	Defisit APBN (Rp T)	Pembiayaan Utang (Rp T)
2024	39,8%	507,8	556,6
2025	40,46%	695,1	736,3
2026	39,96% (Target)	689,1 (Target)	832,2 (Target)

Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2026 dan Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Tabel 5, peningkatan defisit anggaran negara selama tahun 2024–2026 disertai dengan lonjakan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah yang signifikan. Di tahun 2024, jumlah pembiayaan utang tercatat sebesar Rp556,6 triliun dan meningkat menjadi Rp736,3 triliun di tahun 2025 sejalan dengan tingginya defisit anggaran negara yang mencapai Rp695,1 triliun. Bahkan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan target pembiayaan utang hingga Rp832,2 triliun guna menutupi kekurangan defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Data ini menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah sangat bergantung pada pembiayaan utang untuk mempertahankan keberlangsungan belanja negara serta proyek-proyek pembangunan strategis nasional.

Di sisi lain, proporsi utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat, dari 39,8% pada tahun 2024 menjadi 40,46% pada tahun 2025. Meskipun dalam RAPBN 2026 pemerintah merencanakan untuk menurunkan proporsi utang menjadi 39,96%, kondisi ini tetap menandakan adanya tekanan pada keberlanjutan fiskal negara. Dalam konteks fiskal, peningkatan proporsi utang menandai bahwa ruang bagi pemerintah untuk menambah sumber pembiayaan baru semakin menyusut, karena tanggungan pembayaran pokok dan bunga utang akan terus meningkat setiap tahunnya.

Ketika dikaitkan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), situasi ini menunjukkan bahwa proyek strategis nasional tersebut dilaksanakan dalam konteks kapasitas fiskal negara yang sedang tertekan. Pemerintah memang menempatkan pembangunan IKN sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan investasi, serta memperluas pemerataan pembangunan antar daerah. Akan tetapi, manfaat ekonomi yang diharapkan masih bersifat jangka panjang dan belum dapat secara langsung meningkatkan pendapatan negara dalam waktu dekat. Sebaliknya, kebutuhan pembiayaan pembangunan sudah langsung berdampak pada anggaran negara melalui peningkatan belanja negara dan kebutuhan pembiayaan utang.

Kondisi ini mencerminkan adanya pilihan sulit di bidang fiskal antara mempercepat pembangunan strategis dan mempertahankan stabilitas keuangan negara. Semakin besar kebutuhan dana utang untuk mendukung pembangunan, semakin besar pula risiko fiskal yang akan dihadapi pemerintah di masa depan. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, keadaan ini menjadi krusial karena pemanfaatan utang negara harus dipertanggungjawabkan tidak hanya dari aspek realisasi anggaran, tetapi juga dari efektivitas manfaat ekonomi dan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, peningkatan dalam pembiayaan utang berpotensi memengaruhi prioritas pengeluaran negara di waktu mendatang. Ketika jumlah pembayaran bunga dan pokok utang meningkat, kapasitas fiskal pemerintah untuk memperluas pengeluaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bisa semakin menyusut. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan IKN harus dinilai tidak hanya dari penyelesaian proyek fisik, tetapi juga dari kemampuan proyek tersebut untuk memberikan manfaat ekonomi yang memadai untuk menyeimbangkan beban fiskal dan utang negara yang terus bertambah.

Berdasarkan seluruh diskusi yang telah dilakukan, pembangunan IKN memperlihatkan adanya *trade-off* yang rumit antara tujuan pembangunan jangka panjang dan tekanan pada kondisi fiskal negara dalam waktu dekat. Pertukaran ini tidak hanya tampak dari peningkatan pengeluaran negara serta pembiayaan utang, tetapi juga dari kemungkinan berkurangnya kapasitas fiskal pemerintah untuk sektor kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hubungan antara keuntungan pembangunan IKN, risiko fiskal, dan persyaratan akuntabilitas anggaran, telah disusun matriks pertukaran fiskal sebagai berikut.

Tabel 7. Matriks *Trade-off* Fiskal Pembangunan IKN

Aspek <i>Trade-off</i>	Manfaat Jangka Panjang	Beban Fiskal Jangka Pendek	Risiko <i>Crowding-Out</i>	Strategi Akuntabilitas Anggaran
<b>Pembangunan Infrastruktur IKN</b>	Mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan	Peningkatan belanja negara dan tekanan terhadap defisit APBN	Pengurangan ruang fiskal untuk belanja sosial dan program prioritas lain	Pengawasan realisasi anggaran dan evaluasi efektivitas belanja
<b>Pembiayaan Pembangunan IKN</b>	Menarik investasi dan memperluas aktivitas ekonomi di masa depan	Peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah	Potensi peningkatan beban bunga utang dan keterbatasan fiskal	Transparansi pembiayaan dan pengendalian risiko fiskal
<b>Relokasi dan Pembangunan Kawasan Pemerintahan</b>	Efisiensi administrasi pemerintahan jangka panjang	Biaya pembangunan fasilitas dan sarana pemerintahan yang besar	Penundaan atau pengurangan anggaran sektor lain	Penerapan prinsip efisiensi dan <i>value for money</i>
<b>Peningkatan Aktivitas Ekonomi Wilayah</b>	Membuka lapangan kerja dan memperluas investasi regional	Manfaat ekonomi belum dirasakan secara langsung dalam jangka pendek	Ketimpangan manfaat antarwilayah dan antar kelompok masyarakat	Evaluasi dampak ekonomi dan sosial secara berkala
<b>Pengelolaan APBN</b>	Mendukung transformasi	Tekanan terhadap stabilitas fiskal dan	Keterbatasan kemampuan APBN	Penerapan SAP, transparansi, dan

	pembangunan nasional	fiscal space pemerintah	membayai program kesejahteraan	akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara
--	----------------------	-------------------------	--------------------------------	---

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 7, pembangunan IKN menunjukkan adanya *trade-off* yang rumit antara tujuan pembangunan berjangka panjang dan tekanan fiskal jangka pendek yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dari sudut pandang manfaat, pembangunan IKN diprediksi dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, meningkatkan distribusi pembangunan antarwilayah, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja di masa mendatang. Namun, untuk meraih sasaran tersebut, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran negara dalam jumlah signifikan di tengah situasi APBN yang masih mengalami defisit dan keterbatasan dalam ruang fiskal.

Sebaliknya, pembangunan IKN juga menimbulkan risiko *crowding-out*, yaitu situasi ketika alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai sektor-sektor lain yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Risiko ini menjadi sangat krusial karena peningkatan belanja pembangunan dan pembiayaan utang dapat memperkecil fleksibilitas APBN dalam memenuhi kebutuhan publik yang lain.

Oleh karena itu, strategi akuntabilitas anggaran merupakan elemen yang signifikan dalam pengelolaan pembangunan IKN. Dalam kacamata akuntansi pemerintah, penggunaan anggaran negara harus dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding dengan beban fiskal yang ditanggung oleh negara sehingga proyek tersebut tidak menjadi beban APBN dalam jangka waktu yang panjang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan adanya dilema dalam kebijakan fiskal antara usaha untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang strategis dan menjaga keberlanjutan fiskal negara. Pemanfaatan anggaran IKN berperan dalam peningkatan pengeluaran negara dan tekanan terhadap defisit APBN di tengah keterbatasan sumber daya fiskal pemerintah. Situasi ini semakin jelas terlihat melalui meningkatnya kebutuhan untuk membiayai utang dan tingginya pengeluaran negara pada sektor prioritas lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya *opportunity cost* dan risiko *crowding-out* dalam pengalokasian anggaran pembangunan IKN. Penggunaan anggaran negara untuk proyek strategis jangka panjang berpotensi mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam memperluas program kesejahteraan masyarakat yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Di sisi lain, pembangunan IKN tetap dipandang sebagai investasi strategis yang diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan pemerataan pembangunan, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja di masa depan. Namun demikian, manfaat kesejahteraan tersebut masih bersifat *projected welfare* atau manfaat jangka panjang yang belum sepenuhnya terealisasi, sedangkan beban fiskalnya telah langsung terlihat melalui peningkatan belanja negara dan pembiayaan utang.

Dalam sudut pandang akuntansi pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengelolaan anggaran pembangunan IKN memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian fiskal agar manfaat ekonomi dan sosial yang diperoleh dapat sebanding dengan beban fiskal yang ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya harus diukur dari aspek fisiknya, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas fiskal dan memastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.

Penelitian ini memiliki sejumlah batasan karena menerapkan metode deskriptif kualitatif dan memanfaatkan data sekunder dari APBN, sehingga belum dapat memberikan pengukuran dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif. Untuk itu, diharapkan bahwa penelitian di masa mendatang bisa menerapkan metode kuantitatif dengan indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan yang lebih dapat diukur, sehingga hubungan antara pembangunan IKN, defisit APBN, dan kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis dengan lebih menyeluruh.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintahan yang telah memberikan panduan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendapatkan data dan referensi, khususnya data Nota Keuangan APBN dan RAPBN yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Albani, R. Y., Ramadhani, M., Hidayat, R., Ilham, & Siswajanthry, F. (2026). *KEBIJAKAN DEFISIT APBN 2026 SEBAGAI INSTRUMEN*. 8, 9383–9390.
2. Erival, C. Y., Handayani, M., & Akmal, N. (2023). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Fiskal Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 7(2), 230–239. <https://doi.org/10.30871/jama.v7i2.6682>
3. Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
4. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
5. Putri, N. E., Jeddawi, M. F. H., & Utami, F. R. (2021). Analisis Hubungan Defisit Keseimbangan Primer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP ...)*, 3(2)(1), 69–77. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/download/2067/1003>
6. Shafiyah Nur, A., & Livia Putri, M. (2023). Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara Dalam Defisit APBN Pada Tahun 2022. *Politics and Governance*, 8(1), 24–37. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/8794>
7. Sinaga, C., Purba, D. C., Lisari, S. P., Syafila, S., Pangestoeti, W., Raja, U. M., & Haji, A. (2025). Keseimbangan APBN dalam Konteks Pembangunan dan Pengelolaan Utang Negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 108–116. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
8. Soebagiyo, D., & Dewi, H. K. (2026). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Defisit Anggaran Indonesia Tahun 2000-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 2(2), 139–150. <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/download/8497/4933>
9. Wardani, A. S., Saputra, M. A., Niarsih, M., & Malik, A. (2023). *KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENGGERAK PERTUMBUHAN INKLUSIF PELUANG DAN TANTANGAN DI NEGARA BERKEMBANG*. 01(01), 86–91.
10. *BUKU II NOTA KEUANGAN BESERTA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025*. [https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK\\_UU\\_APBN\\_Lapsem/NOTA\\_KEUANGAN\\_APBN\\_TA\\_2025.pdf](https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK_UU_APBN_Lapsem/NOTA_KEUANGAN_APBN_TA_2025.pdf)
11. *BUKU II NOTA KEUANGAN BESERTA RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/d44ea466-4396-41ac-bda7-71c218b2cd25>